

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 10/PP.00.01/K.NT/11/2025

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali

- Kota Dan Wakil Wali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
 11. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 13. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686374/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
 14. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686171/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

- 15. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686172/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 16. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686173/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 17. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686174/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 18. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686176/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 19. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686177/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 20. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686178/2025 Tanggal 2 Desember 2024; dan
- 21. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686180/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas :
- a. *Admin* SiGapLapor
 - 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh *user* SiGapLapor;
 - 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 - 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan *helpdesk* SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
 - 4. *Admin* SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai *co-admin* yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.

b. *User SiGapLapor*

1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada *admin* SiGapLapor sesuai tingkatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 1 November 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA



Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI; dan
2. Yang bersangkutan.

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Abdul Asis, S.H.	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran	Admin
2.	Paulus Ferianus Ivodius Bogar, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Redemptus Yudha Pradana Pangkur, S.H.	Staf	User
4.	Leonard D. S. Mundus, S.H.	Staf	User
5.	Syahrul Pua Upa	Staf	User

2. BAWASLU KOTA KUPANG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ramadhan R. Guhir, S.H.	Staf	Admin
2.	Yathi Kana Kadja, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Samy Klomanghitis, S.H.	Staf	User
4.	Joko Apriyatno Sadukh	Staf	User

3. BAWASLU KABUPATEN KUPANG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Polcemon L. Kollan, ST	Kasubbag PPPSH	Admin
2.	Angela G. Bupu, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Iwan G. Passu, S.H.	Staf	User
4.	Yulesni A. Sine, S.H.	Staf	User
5.	Yohanis Bois, S.H.	Staf	User

4. BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Saul P. Timo, S.H.	Kasubbag PPPSH	Admin
2.	Melan Yusuf Nomleni	Staf	Co-Admin/User
3.	Erry Tri Wijayanti	Staf	User
4.	Nofrid Feto Liunokas	Staf	User
5.	Yemri Kuanine	Staf	User

5. BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Carles Jeremias Lau, S.H.	Kasubag PPPSH	Admin
2.	Franco Peter Modok, S.H.	Staf	User
3.	Petrus Immar Pascalis Kosaplawan, S.H.	Staf	User
4.	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	User

6. BAWASLU KABUPATEN BELU

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Raynancia Yonitha Serang, S.H.	Kasubag PPPSH	Admin
2.	Anselmus Lou, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Azirman, S.AP	Staf	User
4.	Jefrianus Mau Leuk, S.H.	Staf	User

7. BAWASLU KABUPATEN MALAKA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Jessy Diego F. Alnabe, S.H.	Kasubbag PPPSH	Admin
2.	Pancratius Bria Seran, S.H.	Staf	User
3.	Astrianito Bria, S.H.	Staf	User
4.	Marius Seran Moruk, A.Md	Staf	User

8. BAWASLU KABUPATEN ALOR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Jekson Besituba, S.H.	Staf	Admin
2.	Paulus Dedianto Srituka, S.E.	Staf	User
3.	Faridh Qamal B. Arrazaki, S.E.	Staf	User
4.	Ansharullah Kurniawan Zufri, S.H.	Staf	User

9. BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Agustinus Boli, S.H.	Staf	Admin
2.	Herdalena Wiranti, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Kayetanus Boli Nunang, S.Pi	Staf	User
4.	Liberius Senari Asan Lamawuran	Staf	User

10.BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Oktovianus Y. Lega Laot, S.Sos	Staf	Admin
2.	Yohanes Robert KT Lamablawa, S.H.	Staf	User
3.	Laurensius Liwun	Staf	User
4.	Fairul Rachmadi Sandrabone, S.H.	Staf	User

11.BAWASLU KABUPATEN SIKKA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Yohanes Moa, S.H.	Staf	Admin
2.	Agustinus Fanti, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Inocentius Efraim, S.H.	Staf	User
4.	Carla L. A. Mones, S.H.	Staf	User

12.BAWASLU KABUPATEN ENDE

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Elisabeth Renggi, S.Sos	Kasubag PPPSH	Admin
2.	Yohana T. Sagho, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Ferdinandus Anadena, S.H.	Staf	User
4.	Abdurahim S. Putra, S.H.	Staf	User

13.BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Suhardi Kana	Staf	Admin
2.	Silvano L. Raga Legu	Staf	Co-Admin/User
3.	Isral Yondri	Staf	User
4.	Antonius Raga	Staf	User
5.	Ekarni Amir	Staf	User

14.BAWASLU KABUPATEN NGADA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Elias Wilbrodus D. Soi ,S.H.	Staf	<i>Admin</i>
2.	Alexandro Eulogius Henuk Nay Nawa, S.H.	Staf	<i>Co Admin/User</i>
3.	Anselmus Nua, S.H.	Staf	<i>User</i>
4.	Romanus Teru	Staf	<i>User</i>

15.BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Heronimus Nanggur, S.E.	Kasubbag PPPSH	<i>Admin</i>
2.	Yosef Freinademetz Jehoman, S.S	Staf	<i>Co-Admin/User</i>
3.	Elfridus True Gonsales, S.H.	Staf	<i>User</i>
4.	Ruslan	Staf	<i>User</i>

16.BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Marselinus Tonggo, S.H.	Kasubag PPPSH	<i>Admin</i>
2.	Pricilla Natalia Atom, S.H.	Staf	<i>Co-Admin/User</i>
3.	Yohanes Paulus Marianus Mami, S.H.	Staf	<i>User</i>
4.	Dionisia Etra Said, S.E.	Staf	<i>User</i>
5.	Modablofel Julines, S.H.	Staf	<i>User</i>

17. BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Matheus Romanus Hoga Open, S.H.	Staf	Admin
2.	Bintang Andika Falah, S.H.	Staf	User
3.	Yulianus J. Pampung, S.Pd	Staf	User
4.	Romanto Mas Jahang	Staf	User

18. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Lucas Lengga Tiala, S.Fil	Staf	Admin
2.	Inocentius Damma Renna, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Faza Sufi Ushima, S.H.	Staf	User
4.	Margareta Milla	Staf	User

19. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Andrys B. Tanggela, A.Md	Kasubag PPPSH	Admin
2.	Fredrick Umbu Pati Wedu, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Christian Einy Toda Watu, S.H.	Staf	User
4.	Yohanes Chrisnayanto, S.H.	Staf	User
5.	Yuli Yanti Pandang, SST	Staf	User

20. BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Hengki U. Hina Malotung, S.H.	Staf	Admin
2.	Ulvi Wulan, S.H.	Staf	User
3.	Victor Imanuel Putra, S.H.	Staf	User
4.	Dominggus Laki Nau	Staf	User

21. BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Bala Hunggu Mila, S.Sos	Kasubbag PPPSH	Admin
2.	Norvianus A. U. Muka, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Maya Handayani, S.H.	Staf	User
4.	Chindy Novela Permata Bondi,S.H.	Staf	User

22. BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Admin
2.	Khoirunnisa Mauliddina, S.H.	Staf	Co-Admin/User
3.	Melkianus Kanni	Staf	User
4.	Jems Tagi, S.H.	Staf	User

23. BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Anggi Damarizka Rangkuti	Staf	Admin
2.	Leionardho E. Balukh	Staf	Co-Admin/User
3.	Hilario Masno	Staf	User
4.	Sahrian D. Duka	Staf	User

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 1 November 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA**



Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si